

Waspada Bencana, Diskar PB Kota Bandung Siagakan Puluhan Personel

BANDUNG (IM)- Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar) PB Kota Bandung menyiagakan puluhan personel mengantisipasi potensi terjadinya peristiwa bencana.

Pelaksana tugas (Plt) Diskar PB Kota Bandung, Gun Gun Sumaryana mengatakan, personel yang disiagakan mencapai puluhan untuk mengantisipasi bencana di tengah cuaca tidak menentu saat ini.

“Alhamdulillah kita senantiasa melaksanakan piket, karena kita punya UPT. Ada empat UPT. Selain itu kantor pusat di Jalan Sukabumi ada 45 orang, di UPT 10 orang yang bekerja 24 jam untuk mengantisipasi atau melakukan penanganan kebakaran,” kata Gun Gun Sumaryana, Kamis (21/7).

Gun Gun Sumaryana menuturkan, apabila diperlukan pihaknya akan terjun melaksanakan evakuasi saat peristiwa bencana terjadi. Apabila peralatan yang diperlukan kurang maka segera berkoordinasi.

Pihaknya berharap tidak terjadi peristiwa bencana di Kota Bandung. Namun begitu, para personel terus melakukan pengawasan serta siaga apabila terjadi sebuah peristiwa bencana.

“Sejauh ini kita menerima laporan dari masyarakat terkait peristiwa kebakaran, bencana ringan. Kesadaran masyarakat mengantisipasi potensi kebakaran relatif sudah baik. Hal ini terlihat dari kasus kebakaran di bulan Juli relatif rendah dibandingkan bulan Juli tahun 2021 lalu,” ucapnya.

Diskar PB pun mengimbau masyarakat untuk membuang sampah pada tempat yang disediakan dan tidak membuang ke sungai. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi potensi banjir akibat saluran air mampet.

“Kalau bencana tidak bisa dihindarkan, teman-teman masyarakat sudah pada mengetahui menghubungi mana dan dinas kebakaran di 113. Apapun tugas kita tanpa dipungut apapun, jangan ragu-ragu untuk segera melapor kepada kita,” ujar dia. ● **pur**

Kematian Ibu Hamil dan Bayi di Kab. Bogor, Jadi Perhatian Menkes

CIBINONG (IM)- Angka kematian ibu hamil di Indonesia mencapai 7.800-an kasus, lalu angka kematian bayi sebanyak 25.000-an per tahun. Hal ini menjadi perhatian serius Kementerian Kesehatan.

Untuk menekan angka kematian ibu hamil, angka kematian bayi dan menurunkan angka balita stunting tersebut, Kementerian Kesehatan akan melakukan berbagai upaya, salah satunya pemberian gizi kepada remaja perempuan, ibu hamil dan balita.

“Langkah pertama kami minta remaja putri dan ibu hamil rajin berolahraga, kedua kami akan mensosialisasikan pentingnya makanan bergizi dan ketiga kami akan berikan vitamin penambah darah kepada mereka,” kata Menteri Kesehatan, Budi Gunawan Sadikin kepada wartawan di Gedung SMKN 1 Cibinong, Kamis (21/7).

Budi Gunawan Sadikin menambahkan bahwa pemberian vitamin penambah darah dan tambahan makanan bergizi kepada ibu hamil akan dilaksanakan oleh petugas Puskesmas, tempat ibu hamil berdomisili

Sementara pemberian vitamin penambah darah kepada para remaja putri, jajarannya akan melibatkan pihak sekolah.

“Pemberian vitamin yang kadar hemoglobin nya (HB) 12 ke atas, pemberian vitamin penambah darahnya seminggu sekali dan untuk yang HB nya di bawah 12, maka seminggu dua kali. Pihak sekolah, baik itu PMR maupun UKS, dari jenjang SMP dan SMA, kami minta bantu melaksanakan program pemberian vitamin penambah darah ini,” tambah Budi Gunawan Sadikin.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Mike Kartalina Suwardi menjelaskan angka kematian ibu hamil di Kabupaten Bogor mencapai 84 kasus, kematian bayi 192 kasus dan angka bayi stunting mencapai 32 ribu.

“Angka kematian ibu hamil, kematian bayi dan angka bayi stunting di Kabupaten Bogor terus menurun, bahkan angka rata-ratanya sudah lebih kecil dibanding di tingkat nasional,” jelas Mike Kartalina Suwardi. ● **gio**

8 Nusantera



IDN/ANTARA

DESAKAN PENERAPAN GANJIL GENAP DI BANDUNG

Sejumlah kendaraan bermotor melintas di kepadatan lalu lintas di Pasteur, Bandung, Jawa Barat, Kamis (21/7). Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan mendesak Pemerintah Kota Bandung untuk kembali menerapkan kebijakan ganjil genap di Kota Bandung seiring dengan kemacetan di Kota Bandung yang meningkat setelah pelonggaran kebijakan PPKM serta aktivitas anak-anak masuk dan pulang sekolah.

Laporkan Dugaan Mafia Tanah, Petani Puncak akan Demo ke Istana Presiden

Jika laporan dugaan mafia tanah itu tak direspons secara cepat, LPRI Bogor Raya ‘mengancam’ akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Bogor maupun Istana Merdeka, DKI Jakarta.

CARINGIN (IM)-Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Bogor Raya sudah melaporkan dugaan mafia tanah redistribusi tanah eks hak guna usaha (HGU) PT. Redjo Sari Bumi di Desa Pancawati, Caringin, Kabupaten Bogor.

LPRI Bogor Raya selaku kuasa hukum petani penggarap di Gunung Gede Pangrango (Puncak) melaporkannya, ke beberapa instansi sekal-

igus, yaitu Kejaksaan Agung, Bareskrim Mabes Polri, Kementerian ATR/BPN dan Polda Jawa Barat.

Tak hanya itu, jika laporan dugaan mafia tanah itu tak juga direspons secara cepat, LPRI Bogor Raya ‘mengancam’ akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Bogor maupun Istana Merdeka, DKI Jakarta.

“Sebelumnya tanggal 12 Juli kemarin, kami sudah melaporkan dugaan mafia tanah

di Desa Pancawati, dengan luas lahan minimal 14 hektare kepada beberapa instansi sekaligus, yaitu Kejaksaan Agung, Bareskrim Mabes Polri dan Kementerian ATR/BPN. Lalu hari ini, kami melaporkan tindak pidananya kepada Polda Jawa Barat. Jika, tak direspons secara cepat, maka kami akan melakukan unjuk rasa di depan istana, baik di Kota Bogor maupun DKI Jakarta,” kata Ketua LPRI Bogor Raya, Puguh Kuswanto kepada wartawan, Kamis (21/7).

Puguh Kuswanto menuturkan, dalam laporannya LPRI Bogor Raya menyerahkan berkas kronologis maupun modus dugaan mafia tanah terjadi, baik di Desa Pancawati, Desa Cimande, Caringin atau di desa atau kecamatan lainnya.

Karena pada pelaksanaan redistribusi tanah atau 1.374cSHM pada 30 Mei 2016 lalu, yang diserahkan langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) oleh dua orang perwakilan petani penggarap sebagai simbolis, 234 hektare lahan di Desa Pancawati, Cimande, Tangkil, Kecamatan Caringin serta Desa Bojongmurni, Cibedug, Kecamatan Ciawi diakui telah diserahkan kepada para petani penggarap.

“Untuk mempermudah penyelidikan aparat hukum, Satgas Mafia Tanah dan Kementerian ATR/BPN, berkas kronologis dan mudus operandi mafia tanah kami laporkan secara gamblang. Kami menagih janji Kapolri, Kejaksaan Agung dan Menteri ATR/BPN dalam memberantas aksi mafia tanah,”

tutur Puguh Kuswanto.

Ia melanjutkan bahwa di Desa Pancawati, telah terjadi peralihan hak tanah dari petani penggarap kepada pihak lainnya, yang bukan warga sekitar. Hingga dipastikan, melanggarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

“Banyak pelanggaran yang terjadi dalam pendaftaran redistribusi tanah eks HGU PT Redjo Sari Bumi baik, seperti ada warga negara asing yang memiliki dua SHM dengan total luas lahan 1 hektare lebih. Lalu juga ada pemaksaan pengosongan lahan yang dilakukan oleh oknum aparat desa, dengan modus perjanjian pinjam nama dan pergantian rugu tanah yang tidak sesuai seperti Rp 15 ribu per meter,” lanjutnya. ● **gio**



IDN/ANTARA

PENURUNAN LUAS LAHAN PERTANIAN DI MATARAM

Foto udara persawahan di antara perumahan di Kecamatan Sekarbela, Mataram, NTB, Kamis (21/7). Data Dinas Pertanian Kota Mataram mencatat lahan pertanian di kota Mataram menurun sebanyak 15 hektare pada 2022 yakni dari 1.513 hektare menjadi 1.498 hektare.

Diduga Cemari Kawasan Situ Ciburuy, Satpol PP KBB Segel Tiga Pabrik

NGAMPRAH (IM)- Tiga pabrik yang diduga pencemab tercemarnya kawasan Situ Ciburuy ditutup Satpol PP KBB bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Kabid Trantibum Transmas Satpol PP KBB, Poniman mengatakan, pihaknya melakukan penutupan atau penyegel sementara tiga pabrik yang menjadi tempat pencucian karung bekas yang diduga menyebabkan adanya limbah yang mencemari kawasan Situ Ciburuy.

“Penyegelan yang dilakukan Satpol PP KBB terhadap tiga pabrik ini dilakukan lantaran limbah industri tersebut diduga mencemari aliran air di Situ Dua Ciburuy dan ke Situ Ciburuy sendiri,” katanya kepada wartawan, Kamis (21/7).

Dia menegaskan, dengan adanya penindakan tersebut diharapkan masyarakat bisa sadar akan pentingnya menjaga lingkungan sekitar.

“Kami bersama DLH

akan memberikan sosialisasi terkait perizinan yang harus ditempuh sebelum mendirikan perusahaan atau industri, baik kepada masyarakat Ciburuy khususnya dan umumnya kepada seluruh warga KBB,” terangnya.

Dia menyebut, ada tiga titik yang disegel sementara, antara lain dua tempat pencucian karung dan satu tempat pembuatan batak.

“Hasil pengecekan diketahui bahwa pH air di lokasi tersebut mencapai 12,43. Angka tersebut di ambang batas normal, yakni 6-8 pH,” sebutnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, warga Desa Ciburuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) dibuat panik lantaran kondisi air di Situ Dua Ciburuy berubah warna hitam.

Warga menduga kondisi tersebut terjadi lantaran adanya pencemaran yang berasal dari limbah pabrik. ● **pur**

Orang Tua Harus Dampingi Anak Saat Mengakses Internet

BOGOR (IM)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) menyebutkan pentingnya peran orang tua mendampingi anak saat mengakses internet.

Ketua P2TP2A Wanoja Mitandang Kabupaten Bogor, Euis Kurniasih Hidayat menegaskan, penguatan kepada orang tua dan penguatan kepada masyarakat, sangat diperlukan, apalagi perlindungan dan pemenuhan hak anak harus diwujudkan kapan saja dan di mana saja tidak terkecuali saat mengakses internet.

Mengingat P2TP2A ini hanya petugas layanan yang menangani kasusnya, sehingga mengenai sosialisasi pencegahan sesungguhnya adalah tanggung jawab bersama dari semua sektor. Itu merupakan salah satu prioritas, penguatan, pemberdayaan masyarakat,” ujar Euis, kemarin.

Berdasarkan data P2TP2A, kasus kekerasan yang menimpa anak di Kabupaten Bogor antara lain akibat penggunaan internet yang tidak terkontrol.

“Tahun 2021, sudah ada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), yang bisa membantu kami dalam proses percepatan,” terang Euis,

Ia melanjutkan, kalau biasanya melakukan outreach kasus lapangan sendiri, sekarang bisa berkomunikasi dengan UPT yang berada di wilayah bersangkutan. Mereka melakukan penjangkauan, setelah itu kebutuhannya seperti apa baru disampaikan kepada kami dan dibawa ke P2TP2A untuk penanganan selanjutnya,” lanjut Euis.

Dia menggambarkan, sebagai strategi percepatan perlindungan perempuan dan anak, Pemkab Bogor melalui DP3AP2KB telah menyiapkan Sistem Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Berbasis Masyarakat atau SI GADIS. SI GADIS adalah sistem pelaporan tindak kekerasan yang menimpa perempuan dan anak secara online, melalui layanan aplikasi atau website www.sigadis.bogorkab.

Selanjutnya, Dinas Komunikasi dan Informatika (DisKOMINFO) Kabupaten Bogor juga menyediakan layanan 112 dan layanan call center Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 yang dapat diakses melalui hotline 021-129 atau whatsapp 08111-129-129.

Soal Kabupaten Layak Anak (KLA), Euis menjelaskan, yang penting anak itu sedapat mungkin terbebas dari kekerasan dan eksploitasi. Kemudian jika sudah terjadi, harus ditangani, setelah ditangani mereka mendapatkan layanan pasca trauma. Jika diperlukan, ditempatkan di rumah aman (Safe House) atau rumah singgah yang sudah disiapkan.

“Sebuah bangsa akan besar jika memiliki sikap besar terhadap anak-anak generasi penerus. Mari kita bahagiakan anak-anak kita dengan memenuhi hak mereka seperti hak hidup, tumbuh kembang, pendidikan, berpartisipasi dan bebas dari kekerasan, anak terlindungi Indonesia maju”, jelas Euis. ● **gio**



IST

Ketua P2TP2A Wanoja Mitandang Kabupaten Bogor, Euis Kurniasih Hidayat

Tiga Begal Rampas Motor Mahasiswa di Tajur Halang

BOGOR (IM)- Pembegal atau perampas sepeda motor dengan kekerasan terus mencari korban. Kali ini menimpa seorang mahasiswa yang terjadi di Jalan Raya Tajur Halang wilayah Kabupaten Bogor. Korban bernama Mohamad Risyaf Firmansyah (20). Tak cuma kehilangan sepeda motor tetapi juga handphone dirampas ketika dirinya sedang melintas di lokasi kejadian. Dari pengakuannya saat melapor ke polisi, korban mengatakan dirinya dianiaya oleh tiga orang penjajah jalan hingga sempat tak sadarkan diri.

Peristiwa pembegalan motor, perampasan handphone dan penganiayaan berawal saat ia hendak pulang ke Kota Depok. Malam itu ia belajar kelompok di rumah temannya di Bogor. Kasus ini terekam kamera pemantau CCTV.

Arnold, seorang saksi mengatakan, kejadian terjadi sekitar pukul 01.44 WIB, Kamis dini hari (21/7). Korban dianiaya pelaku yang berjumlah tiga orang. Kondisi jalan sedang sepi. “Dari rekaman CCTV terlihat korban ditent-

ang sampai dia jatuh dari motor. Dia (korban) luka pada bagian pelipis mata,” kata Arnold.

Saksi mengaku saat kejadian, dia sedang tidur di konter handponenya. Dia terbangun mendengar suara gaduh. Ketika melihat rekaman CCTV, pelaku menganiaya korban. Menerima laporan ini, Kapolsek Tajurhalang, Iptu Tamar mengatakan, peristiwa terjadi ketika korban dalam perjalanan pulang kerja. Korban hendak menuju rumahnya di Komplek Inkopad Desa Sasak Panjang. Di tengah jalan, korban dicegat dua motor berboncengan.

“Langsung mepet korban dan dihajar hingga korban pingsan di jalan,” katanya.

Saat korban sudah siuman, barulah dia membuat laporan ke polisi. Korban ditolong oleh pengendara motor yang melintas. Kasusnya masih didalam. Petugas masih memeriksa sejumlah saksi dan barang bukti. “Di sekitar lokasi meski jalan utama namun sepi. Anggota masih mencari kamera rekaman CCTV dan saksi-saksi,” pungkasnya. ● **gio**

Gencar Vaksinasi, Polresta Bogor Kekurangan Vaksin Covid-19

BOGOR (IM)- Polresta Bogor Kota kekurangan vaksin Covid-19 setelah terus-menerus melakukan vaksinasi.

Agar terus bisa melakukan vaksinasi, petugas kini menggandakan stok vaksin milik Dinas Kesehatan Kota Bogor. Petugas terancam tak bisa melakukan vaksinasi jika stok baru tidak segera datang.

Wakil Kepala Polresta Bogor Kota, Ferdy Irawan mengungkapkan kekurangan stok vaksin ini sudah berlangsung dalam satu pekan ini. “Sementara itu kami gunakan stok vaksin milik Dinas Kesehatan, stok kita semuanya sudah

habis,” ungkap Ferdy Irawan, Kamis (21/7).

Menurutnya, selama penanganan Covid-19, petugas Polresta Bogor Kota mendapat jatah vaksin sebanyak 85.000.

Dari total vaksin yang ada, seluruhnya sudah habis digunakan dalam program gebyar vaksin ke kampung. “Sekarang tinggal punya Dinkes, ada 350 unit tetapi sebagian juga sudah terpakai,” lanjutnya.

Wakapolresta Bogor sudah mengajukan stok vaksin baru agar bisa terus melakukan vaksinasi warga khususnya vaksin booster. ● **gio**